

SINOPSIS

Indonesia beberapa tahun ini menghadapi cobaan demi cobaan, mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga bencana alam yang menelan banyak korban. Salah satunya gempa tektonik yang meluluhlantakkan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 yang lalu. Gempa bumi 27 Mei 2006 yang lalu adalah sebuah gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kurang lebih terjadi pada pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Akibat gempa yang terjadi banyak sekali bangunan perumahan penduduk serta fasilitas umum yang rusak parah khususnya di Kabupaten Bantul sebagai pusat gempa yang terjadi di Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan pusat gempa yang terparah, korban yang terbanyak dan memerlukan dana yang sangat besar dibandingkan Kabupaten yang lain di DIY, sehingga sangat diperlukan keseriusan pemerintah dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, *Bagaimana Evaluasi Kinerja Kabupaten Bantul Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi (Satu Tahun Pasca Gempa)?*

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati dan Kabupaten Bantul sebagai unit analisis. Data yang di peroleh berasal dari dokumentasi-dokumentasi dan wawancara dengan pihak Pemkab Bantul serta di dukung oleh media massa. Oleh karena itu penelitian ini hanya untuk memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah yang dianalisa secara kualitatif.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan program penanggulangan pasca bencana yaitu program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang beracuan pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 serta aturan-aturan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Sampai saat ini program rehabilitasi dan rekonstruksi masih dalam tahap pelaksanaan, meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Bantul dalam satu tahun setelah terjadinya gempa telah banyak melakukan perubahan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana perumahan dan permukiman, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana pengairan. Menurut pendapat masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sudah terlaksana dengan baik, namun disamping itu masyarakat juga merasakan kurangnya koordinasi dan pengawasan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan desa setempat, hal ini dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ketika pemberian dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan melalui Pokmas, seperti adanya pemotongan dana Pokmas dengan alasan tertentu.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, diharapkan meningkatkan koordinasi dan pengawasan di lapangan dan menindak dengan tegas oknum-oknum tertentu yang melakukan penyelewengan, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dan